

**PENGARUH TEMUAN AUDIT, TRANSPARANSI, DAN AKUNTABILITAS
TERHADAP TINGKAT KORUPSI
(Studi pada Pemerintah Daerah Jawa Timur Tahun 2015-2018)**

***THE EFFECT OF AUDIT FINDINGS, TRANSPARENCY, AND ACCOUNTABILITY
ON THE LEVEL OF CORRUPTION
(Study on The Government of East Java in 2015-2018)***

Safira Rifka Saraswati¹, Dedik Nur Triyanto²

Prodi S1 Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Telkom

¹safirarifka98@gmail.com, ²dedik.triyanto@telkomuniversity.ac.id

ABSTRAK

Temuan Audit, Transparansi, dan Opini Audit pada laporan keuangan yang menunjukkan akuntabilitas suatu pemerintah daerah diharapkan mampu mengurangi terjadinya tindakan korupsi. Terkait dengan hal itu, terdapat pemerintah daerah yang mendapatkan hasil temuan audit sedikit, transparansi, dan akuntabilitas yang baik tetapi masih terjerat tindak pidana korupsi. Sehingga, perlu dilakukan penelitian untuk melihat keterkaitan temuan audit, transparansi, dan akuntabilitas dengan tingkat korupsi pada pemerintah daerah di Jawa Timur.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh temuan audit, transparansi, dan akuntabilitas terhadap tingkat korupsi pada pemerintah daerah di Jawa Timur tahun 2015-2018. Data yang digunakan dalam penelitian diperoleh dari Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) tahun 2015-2018, masing-masing *website* pemerintah daerah di Jawa Timur, laporan tahunan KPK. Populasi dalam penelitian adalah 39 instansi pemerintah daerah di Jawa Timur. Teknik pemilihan sampel yang digunakan yaitu *nonprobability sampling* dan sampel jenuh. Metode analisis data dalam penelitian ini adalah regresi data panel dengan menggunakan software *EViews 10*.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara simultan temuan audit, transparansi, dan akuntabilitas berpengaruh signifikan terhadap tingkat korupsi. Sedangkan secara parsial, temuan audit dan transparansi tidak berpengaruh terhadap tingkat korupsi, akuntabilitas berpengaruh negatif signifikan terhadap tingkat korupsi.

Kata Kunci : Temuan Audit, Transparansi, Akuntabilitas, Tingkat Korupsi

ABSTRACT

Audit Findings, Transparency, and Audit Opinions on financial statements that show accountability about local government which is expected to reduce corruption. In this regard, the regional government received little audit results, approval, and good accountability but was still entangled. Necessary, research needs to be done to see the relationship of audit findings, assessments, and accountability with the level of corruption in local governments in East Java.

This study aims to determine the effect of audit findings, transparency, and accountability on the level of corruption in local governments in East Java 2015-2018. The data used in the study were obtained from the 2015-2018 Semester Examination Results (IHPS), for each local government website in East Java, the KPK's annual report. The population in the study were 39 local government agencies in East Java. The sample selection technique used is nonprobability sampling and saturated sample. Data analysis method in this research is panel data regression using EViews 10 software.

The results of this study indicate that simultaneous audit findings, transparency, and accountability significantly influence the level of corruption. While partially, audit findings and transparency do not affect the level of corruption, accountability has a significant negative effect on the level of corruption.

Keywords: *Audit Findings, Transparency, Accountability, Corruption Level*

1. Pendahuluan

Fenomena korupsi merupakan salah satu masalah terbesar yang dihadapi oleh bangsa Indonesia sampai saat ini. Hal ini menyebabkan kepercayaan masyarakat semakin berkurang terhadap pemerintah dan menjadi tantangan yang besar bagi pemerintah untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Menurut *Indonesia Corruption Watch*, Provinsi Jawa Timur menduduki peringkat lima besar dengan jumlah 54 kasus korupsi di tahun 2015, 64 kasus korupsi di tahun 2016, 68 kasus korupsi di tahun 2017, serta 52 kasus korupsi di tahun 2018. Hal ini membuat peneliti ingin meneliti penyebab kenaikan kasus korupsi hingga akhirnya kembali menurun. Kasus korupsi di pemerintah daerah tersebut akan berdampak pada kepercayaan masyarakat terhadap bukti audit BPK dengan opini audit dan temuan-temuannya. Oleh karena itu, diharapkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang telah diaudit mampu mencerminkan kualitas dari laporan keuangan tersebut.

Masyarakat ingin mengetahui bagaimana pengelolaan yang transparansi dan akuntabel yang dilakukan pemerintah daerah selama ini. Yang nantinya tidak terdapat temuan audit yang menunjukkan kecurangan dalam

pelaporan keuangan. Oleh karena itu, informasi yang diungkapkan pemerintah daerah kepada masyarakat harus jelas dan riil. Informasi tersebut berupa informasi keuangan maupun non keuangan yang digunakan untuk menilai seberapa transparansinya dan merupakan pertanggungjawaban pemerintah daerah kepada masyarakat serta pihak ketiga yang memberikan pembiayaan. Untuk mengetahui akuntabilitas laporan keuangan pemerintah daerah perlu dilakukan pemeriksaan (diaudit) yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.

Dalam pekerjaan audit, seorang auditor berperan secara signifikan dalam mengurangi kecurangan dan korupsi yaitu melalui pemantauan penggunaan sumber daya publik, audit pemerintahan dapat memperkuat akuntabilitas dan mengurangi penyalahgunaan wewenang dan kekuasaan. Dalam praktiknya di beberapa negara, audit pemerintahan berperan menahan atau memperkecil laju korupsi. Pada daerah dengan temuan audit yang banyak, juga terdapat banyak jumlah kasus korupsi, hal ini berarti hasil audit dapat digunakan sebagai deteksi awal terjadinya praktik korupsi di pemerintah daerah dan juga keparahan tingkat korupsi dapat mengindikasikan banyaknya temuan audit di daerah tersebut. Selain itu, upaya pemerintah daerah dalam melaksanakan perbaikan sesuai dengan rekomendasi auditor secara signifikan dapat menurunkan tingkat korupsi.

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh temuan audit, transparansi, dan akuntabilitas terhadap tingkat korupsi pada Pemerintah Daerah Jawa Timur tahun 2015-2018 secara simultan maupun parsial.

2. Dasar Teori dan Metodologi

2.1 Dasar Teori

2.1.1 Tingkat Korupsi

Menurut (Tuanakotta, T. M. 2010:226) ^[1], korupsi umumnya didefinisi adalah penyalahgunaan jabatan di sektor pemerintahan (*misuse of public office*) untuk keuntungan pribadi. Menurut UU Nomor 20 Tahun 2001^[2], korupsi adalah tindakan melawan hukum yang memperkaya orang atau orang lain dan menyebabkan kerugian negara keuangan. Menurut (Salahudin, 2018:73) ^[3], terjadinya korupsi dari sudut pandang organisasi yaitu kurang adanya teladan dari pemimpin, tidak adanya kultur organisasi yang benar, sistem akuntabilitas di instansi pemerintah kurang memadai, dan manajemen cenderung menutupi korupsi dalam organisasinya.

Tingkat korupsi diukur menggunakan jumlah kasus korupsi yang terjadi di Pemerintah Daerah Jawa Timur yang ditangani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada tahun 2015-2018 (Ode, Hafidz, & Ratmono, 2017)^[4].

2.1.2 Temuan Audit

Menurut (Khasanah, 2014) ^[5], temuan audit merupakan kasus-kasus yang ditemukan BPK terhadap pengungkapan laporan keuangan Pemda atas pelanggaran yang dilakukan suatu daerah terhadap ketentuan pengendalian intern maupun terhadap ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Menurut Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) tahun 2007 ^[6], temuan audit merupakan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dapat menyebabkan salah saji material dan informasi dalam laporan keuangan atau data keuangan lainnya yang secara signifikan terkait dengan tujuan pemeriksaan.

H₂: Temuan audit berpengaruh positif terhadap tingkat korupsi.

Temuan Audit per Periode Berjalan = Jumlah temuan atas kelemahan sistem pengendalian intern + temuan atas ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan. (Rini dan Damiami, 2017)^[7]

Menurut (Masdiantini dan Erawati, 2016)^[8], apabila:

Temuan Audit >1 maka diberi nilai 1 (banyak)

Temuan Audit =1 maka diberi nilai 2 (sedang)

Temuan Audit <1 maka diberi nilai 3 (sedikit)

2.1.3 Transparansi

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010^[9], transparansi berarti memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.

Menurut (Erlanda dan Khairudin, 2016)^[10], terdapat lima indikator yang digunakan untuk mengukur transparansi tersebut, yaitu (1) terdapat pengumuman kebijakan anggaran, (2) tersedia dokumen anggaran dan mudah diakses, (3) tersedia laporan pertanggungjawaban yang tepat waktu, (4) terakomodasinya suara/usulan rakyat, (4) terdapat sistem pemberian informasi kepada publik.

Berdasarkan indikator tersebut, penelitian ini menggunakan pengukuran transparansi dengan skala 1 sampai dengan 4. Apabila memenuhi lima indikator tersebut maka pemerintah daerah tersebut akan diberi skor 4, dan seterusnya. Semakin banyak informasi yang diberikan pemerintah daerah ke dalam website, maka diasumsikan semakin tinggi tingkat transparansi pemerintah daerah tersebut (Erlanda dan Khairudin, 2016).

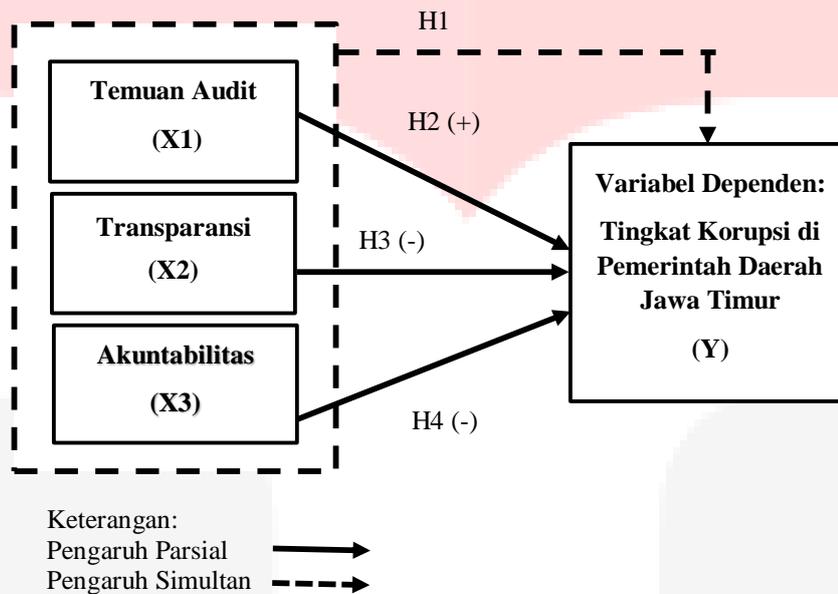
H₃: Transparansi berpengaruh negatif terhadap tingkat korupsi.

2.1.4 Akuntabilitas

Menurut (Mardiasmo, 2018:27)^[11], akuntabilitas publik adalah pemberian informasi dan *disclosure* atas aktivitas dan kinerja finansial pemerintah kepada pihak-pihak yang berkepentingan dengan laporan tersebut. Pemerintah, baik pusat maupun daerah, harus bisa menjadi subjek pemberi informasi dalam rangka pemenuhan hak-hak publik. Berdasarkan UU Nomor 15 Tahun 2006^[12], terdapat empat opini audit, yaitu wajar tanpa pengecualian (WTP), wajar dengan pengecualian (WDP), tidak wajar (TW), dan tidak memberikan pendapat (TMP). Sehingga pengukuran akuntabilitas menggunakan opini audit dengan skala 1 sampai dengan 4. Apabila memperoleh WTP maka diberi skor 4, WDP diberi skor 3, TW diberi skor 2, dan TMP diberi skor 1 (Erlanda dan Khairudin, 2016).

H₄: Akuntabilitas berpengaruh negatif terhadap tingkat korupsi.

2.2 Kerangka Pemikiran



Gambar 1. Kerangka Pemikiran

2.3 Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis statistik deskriptif dan metode analisis regresi data panel. Populasi dalam penelitian ini adalah pemerintah daerah di Jawa Timur menggunakan teknik *nonprobability sampling* dengan metode sampling jenuh (sensus) yang dimana seluruh jumlah populasi dijadikan sampel. Sehingga diperoleh sebanyak 156 sampel yang terdiri dari 39 instansi pemerintah daerah di Jawa Timur dengan periode 2015-2018 atau selama empat tahun.

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi data panel dengan persamaan sebagai berikut:

$$CORRUPT_{i,t} = \alpha_0 + \beta_1 AUIRR_{i,t} + \beta_2 TRANS_{i,t} + \beta_3 AAKUN_{i,t} + \varepsilon$$

Dimana :

<i>CORRUPT</i>	= Tingkat Korupsi
α	= Konstanta
$\beta_1 \beta_2 \beta_3$	= Koefisien regresi masing-masing variabel independen
<i>AUIRR</i>	= Temuan Audit
<i>TRANS</i>	= Transparansi
<i>AAKUN</i>	= Akuntabilitas
ε	= Error term

3. Pembahasan

3.1 Analisis Statistik Deskriptif

Analisis statistik deskriptif bertujuan untuk menjelaskan secara deskriptif atas variabel dependen serta variabel independen yang digunakan dalam penelitian. Berikut adalah hasil pengujian statistik deskriptif dari temuan audit, transparansi, akuntabilitas, dan tingkat korupsi.

Tabel 1 Hasil Uji Statistik Deskriptif

	CORRUPT	AUIRR	TRANS	AAKUN
Mean	0.7115	2.2949	3.0128	3.8526
Maximum	11.0000	3.0000	4.0000	4.0000
Minimum	0.0000	1.0000	1.0000	3.0000
Std. Dev.	1.5198	0.9313	1.3149	0.3557
Observations	156	156	156	156

Sumber: Data yang telah diolah menggunakan EViews 10, 2019

Berdasarkan Tabel 1, menunjukkan bahwa variabel Tingkat korupsi memiliki nilai *mean* lebih kecil dari standar deviasi, yang berarti bahwa data tingkat korupsi bervariasi dan menyebar. Sedangkan variabel Temuan Audit, Transparansi, dan Akuntabilitas memiliki nilai *mean* lebih besar dari standar deviasi, yang berarti bahwa data temuan audit, transparansi, dan akuntabilitas tidak bervariasi dan berkelompok.

3.2 Analisis Regresi Data Panel

3.2.1 Uji Asumsi Klasik

3.2.1.1 Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji adanya korelasi antara variabel bebas atau independen.

Tabel 3 Hasil Uji Multikolinieritas

	AUIRR	TRANS	AAKUN
AUIRR	1.000000	0.049850	0.518749
TRANS	0.049850	1.000000	0.156700
AAKUN	0.518749	0.156700	1.000000

Sumber: Output EViews 10, 2019

Berdasarkan Tabel 3 tersebut, menunjukkan bahwa hasil analisis korelasi AUIRR, TRANS, AAKUN berturut-turut sebesar 0,049850 dan 0,518749. Hal ini menunjukkan bahwa nilai korelasi $< 0,8$ dan dapat disimpulkan bahwa tidak ada korelasi antar variabel bebas atau tidak terjadi multikolinieritas dalam penelitian ini.

3.2.1.2 Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk melihat dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variabel dari residual satu ke pengamatan yang lain.

Tabel 4 Hasil Uji Heteroskedastisitas

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	143207.5	62272.81	2.299680	0.0228
AUIRR	-0.052848	0.098278	-0.537744	0.5915
TRANS	-0.106984	0.065307	-1.638172	0.1035
AAKUN	-0.367330	0.335089	-1.096217	0.2747

Sumber: Output EViews 10, 2019

Berdasarkan Tabel 4 tersebut, menunjukkan bahwa hasil probabilitas dalam setiap variabel $> 0,05$, maka dapat disimpulkan bahwa dalam penelitian ini tidak terjadi heteroskedastisitas.

3.2.2 Metode Estimasi Model

Berdasarkan hasil pengujian model regresi data panel (uji *Chow* dan uji *Hausman*), maka model yang paling baik digunakan dalam penelitian ini yaitu *fixed effect*. Berikut adalah hasil uji *fixed effect*:

Tabel 5 Hasil Uji Statistik Model Fixed Effect

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	317753.5	117111.7	2.713252	0.0077
AUIRR	0.263163	0.156561	1.680901	0.0955
TRANS	-0.069320	0.188626	-0.367500	0.7139
AAKUN	-1.201046	0.570255	-2.106156	0.0374

Effects Specification

Cross-section fixed (dummy variables)

R-squared	0.425769	Mean dependent var	97984.88
Adjusted R-squared	0.219248	S.D. dependent var	50305.01
S.E. of regression	44449.60	Akaike info criterion	24.46690
Sum squared resid	2.25E+11	Schwarz criterion	25.28802
Log likelihood	-1866.418	Hannan-Quinn criter.	24.80040
F-statistic	2.061622	Durbin-Watson stat	2.038963
Prob(F-statistic)	0.001445		

Sumber: Output EViews 10, 2019

Berdasarkan Tabel 5 tersebut, dapat dirumuskan persamaan model regresi data panel dalam penelitian ini sebagai berikut:

$$CORRUPT = 317753,5 + 0,263163AUIRR - 0,069320TRANS - 1,201046AAKUN + e$$

Dimana :

$CORRUPT$ = Tingkat Korupsi

α = Konstanta

$\beta_1\beta_2\beta_3$ = Koefisien regresi masing-masing variabel independen

$AUIRR$ = Temuan Audit

$TRANS$ = Transparansi

$AAKUN$ = Akuntabilitas

ε = Error term

Persamaan regresi diatas dapat diartikan sebagai berikut :

1. Nilai konstanta sebesar 317753,5 menunjukkan bahwa apabila variabel independen pada regresi yaitu Temuan Audit, Transparansi, dan Akuntabilitas bernilai 0, maka variabel dependen pada regresi yaitu Tingkat Korupsi bernilai sebesar 317753,5 satuan.
2. Koefisien regresi X1 yaitu Temuan Audit sebesar 0,263163 menunjukkan bahwa setiap terjadi kenaikan pada Temuan Audit sebesar satu satuan dengan asumsi variabel lain bernilai 0, maka tingkat korupsi juga akan mengalami kenaikan 0,263163 satuan.
3. Koefisien regresi X2 yaitu Transparansi sebesar -0,06932 menunjukkan bahwa setiap terjadi kenaikan pada Transparansi sebesar satu satuan dengan asumsi variabel lain bernilai 0, maka tingkat korupsi juga akan mengalami penurunan 0,06932 satuan.
4. Koefisien regresi X3 yaitu Akuntabilitas sebesar -1,201046 menunjukkan bahwa setiap terjadi kenaikan pada Akuntabilitas sebesar satu satuan dengan asumsi variabel lain bernilai 0, maka tingkat korupsi juga akan mengalami penurunan 1,201046 satuan.

3.3 Uji Simultan (Uji F)

Pengujian simultan digunakan untuk mengetahui apakah variabel-variabel independen bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Berikut adalah hasil uji simultan dalam penelitian ini:

Tabel 6 Hasil Pengujian Hipotesis secara Simultan

Cross-section fixed (dummy variables)			
R-squared	0.425769	Mean dependent var	97984.88
Adjusted R-squared	0.219248	S.D. dependent var	50305.01
S.E. of regression	44449.60	Akaike info criterion	24.46690
Sum squared resid	2.25E+11	Schwarz criterion	25.28802
Log likelihood	-1866.418	Hannan-Quinn criter.	24.80040
F-statistic	2.061622	Durbin-Watson stat	2.038963
Prob(F-statistic)	0.001445		

Sumber: Output E-Views 10, 2019

Berdasarkan Tabel 6 tersebut, hasil pengujian hipotesis secara simultan (uji F) menunjukkan bahwa nilai *probability (F-statistic)* sebesar 0,001445 dimana nilai tersebut < 0,05 dari taraf signifikansi, maka dapat disimpulkan bahwa Temuan Audit, Transparansi, dan Akuntabilitas berpengaruh secara simultan terhadap variabel dependen yaitu Tingkat Korupsi pada pemerintah daerah di Jawa Timur tahun 2015-2018.

3.4 Uji Parsial (Uji t)

Uji t digunakan untuk menunjukkan seberapa jauh pengaruh variabel independen secara individual dalam menerangkan variabel dependen. Berikut adalah hasil pengujian secara parsial dalam penelitian ini:

Tabel 7 Hasil Pengujian Hipotesis secara Parsial

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	317753.5	117111.7	2.713252	0.0077
AUIRR	0.263163	0.156561	1.680901	0.0955
TRANS	-0.069320	0.188626	-0.367500	0.7139
AAKUN	-1.201046	0.570255	-2.106156	0.0374

Sumber: *Output E-Views 10*, 2019

Berdasarkan Tabel 7 tersebut, hasil pengujian hipotesis secara parsial (uji t) menunjukkan bahwa:

1. Nilai *probability* pada variabel Temuan Audit (X1) sebesar 0,0955 dimana nilai tersebut > 0,05 dari taraf signifikansi. Dari hasil tersebut maka dapat disimpulkan bahwa variabel Temuan Audit tidak berpengaruh signifikan secara parsial terhadap Tingkat Korupsi pada pemerintah daerah di Jawa Timur tahun 2015-2018.
2. Nilai *probability* pada variabel Transparansi (X2) sebesar 0,7139 dimana nilai tersebut > 0,05 dari taraf signifikansi. Dari hasil tersebut maka dapat disimpulkan bahwa variabel Transparansi tidak berpengaruh signifikan secara parsial terhadap Tingkat Korupsi pada pemerintah daerah di Jawa Timur tahun 2015-2018.
3. Nilai *probability* pada variabel Akuntabilitas (X3) sebesar 0,0374 dimana nilai tersebut < 0,05 dari taraf signifikansi. Dari hasil tersebut maka dapat disimpulkan bahwa variabel Akuntabilitas berpengaruh signifikan secara parsial terhadap Tingkat Korupsi pada pemerintah daerah di Jawa Timur tahun 2015-2018.

Pembahasan:

1. Pengaruh Temuan Audit Terhadap Tingkat Korupsi

Koefisien regresi variabel temuan audit memiliki nilai sebesar 0,263163 yang artinya memiliki hubungan positif terhadap tingkat korupsi dan nilai tingkat signifikansi 0,0955 > 0,05, yang artinya temuan audit tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat korupsi, maka dapat disimpulkan bahwa H_0 diterima dan H_a ditolak sehingga temuan audit secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat korupsi, yang berarti bahwa banyak atau sedikitnya temuan audit tidak mengindikasikan meningkatnya korupsi pada Pemerintah Daerah Jawa Timur periode 2015-2018. Hasil penelitian ini bertentangan dengan hipotesis dan tidak sejalan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh (Rosyadi dan Budding, 2017) menyatakan bahwa temuan audit oleh BPKP berpengaruh positif terhadap tingkat korupsi dan penelitian (Suhardjanto, 2018) menunjukkan bahwa temuan audit berpengaruh positif signifikan terhadap korupsi.

2. Pengaruh Transparansi Terhadap Tingkat Korupsi

Koefisien regresi variabel transparansi memiliki nilai sebesar -0,06932 yang artinya memiliki hubungan negatif terhadap tingkat korupsi dan nilai tingkat signifikansi 0,7139 > 0,05, yang artinya transparansi tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat korupsi, maka dapat disimpulkan bahwa H_0 diterima dan H_a ditolak sehingga transparansi secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat korupsi, yang berarti bahwa tidak semua transparansi yang maksimum (di atas rata-rata) akan mengurangi tingkat korupsi dan tidak semua transparansi yang minimum (di bawah rata-rata) akan menambah tingkat korupsi pada Pemerintah Daerah Jawa Timur periode 2015-2018. Hasil penelitian ini bertentangan dengan hipotesis dan tidak sejalan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh penelitian (Erlanda dan Khairudin, 2016) menunjukkan bahwa transparansi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat korupsi dan penelitian (Bauhr dan Grimes, 2017) yang menyatakan bahwa transparansi berpengaruh negatif terhadap tingkat korupsi.

3. Pengaruh Akuntabilitas Terhadap Tingkat Korupsi

Koefisien regresi variabel akuntabilitas memiliki nilai sebesar -1,201046 yang artinya memiliki hubungan negatif terhadap tingkat korupsi dengan tingkat signifikansi 0,0374 > 0,05, artinya akuntabilitas berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat korupsi, maka dapat disimpulkan bahwa H_0 ditolak dan H_a diterima sehingga akuntabilitas secara parsial berpengaruh negatif terhadap tingkat korupsi, yang berarti bahwa opini audit yang wajar menunjukkan akuntabilitasnya baik dan diyakini mampu mereduksi tingkat korupsi pada Pemerintah Daerah Jawa Timur periode 2015-2018. Hasil penelitian ini sesuai dengan hipotesis dan sejalan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh (Suhardjanto, 2018)

menunjukkan bahwa akuntabilitas berpengaruh negatif signifikan terhadap korupsi dan penelitian dan penelitian (Rahayuningtyas dan Setyaningrum, 2018) yang menyatakan bahwa akuntabilitas keuangan berpengaruh negatif terhadap tingkat korupsi.

4. Kesimpulan dan Saran

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

- 1) Secara deskriptif dapat dijelaskan sebagai berikut:
 - a. Dari 156 sampel dalam penelitian ini, diperoleh rata-rata tingkat korupsi Pemerintah Daerah Jawa Timur memiliki proporsi 0,7115 kasus korupsi dan rata-rata tingkat korupsi dalam penelitian ini tidak bervariasi. Nilai maksimum tingkat korupsi sebesar 11 yaitu pada Provinsi Jawa Timur tahun 2018 dan nilai minimum sebesar 0 atau yang berarti tidak terdapat kasus korupsi memperoleh 112 sampel dari 156 sampel.
 - b. Dari 156 sampel dalam penelitian ini, diperoleh rata-rata temuan audit Pemerintah Daerah Jawa Timur memiliki proporsi 2,2949 temuan audit dan rata-rata temuan audit dalam penelitian ini tidak bervariasi. Nilai maksimum temuan audit sebesar 3, sedangkan nilai minimum sebesar 1 karena menggunakan pengukuran rasio dan skala interval 1 sampai 3. Nilai maksimum memperoleh 97 sampel dari 156 sampel, sedangkan nilai minimum memperoleh 51 sampel dari 156 sampel.
 - c. Dari 156 sampel dalam penelitian ini, diperoleh rata-rata transparansi Pemerintah Daerah Jawa Timur memiliki proporsi 3,0128 dan rata-rata transparansi dalam penelitian ini tidak bervariasi. Nilai maksimum transparansi sebesar 4, sedangkan nilai minimum sebesar 1 karena menggunakan pengukuran skala interval 1 sampai 4. Nilai maksimum memperoleh 93 sampel dari 156 sampel, sedangkan nilai minimum memperoleh 42 sampel dari 156 sampel.
 - d. Dari 156 sampel dalam penelitian ini, diperoleh rata-rata akuntabilitas Pemerintah Daerah Jawa Timur memiliki proporsi 3,8526 dan rata-rata akuntabilitas dalam penelitian ini tidak bervariasi. Nilai maksimum akuntabilitas sebesar 4 dan nilai minimum sebesar 3 karena menggunakan interval. Nilai maksimum memperoleh 133 sampel dari 156 sampel, sedangkan nilai minimum memperoleh 23 sampel dari 156 sampel.
- 2) Temuan Audit, Transparansi, dan Akuntabilitas secara simultan berpengaruh terhadap Tingkat Korupsi pada Pemerintah Daerah Jawa Timur periode 2015-2018.
- 3) Temuan Audit secara parsial tidak berpengaruh terhadap Tingkat Korupsi.
- 4) Transparansi secara parsial tidak berpengaruh terhadap Tingkat Korupsi.
- 5) Akuntabilitas secara parsial berpengaruh negatif terhadap Tingkat Korupsi.

Saran

1. Bagi peneliti selanjutnya, peneliti mengharapkan penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan referensi bagi peneliti selanjutnya yang ingin meneliti mengenai hal-hal yang berpengaruh terhadap tingkat korupsi seperti temuan audit, transparansi, dan akuntabilitas atau menambahkan periode atau dengan periode yang berbeda serta dapat menambah variabel-variabel lain yang mempengaruhi tingkat korupsi, seperti rasionalis, dan kinerja penyelenggara pemerintahan sehingga diperoleh hasil yang lebih komprehensif.
2. Pemerintah Daerah lebih meningkatkan transparansi dengan menginformasikan setiap perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, serta pertanggungjawaban pemerintah kepada publik sehingga masyarakat dapat melakukan pengawasan terhadap jalannya penyelenggaraan urusan publik dan mencegah tindakan korupsi.

Daftar Pustaka

- [1] Tuanakotta, T. M. (2010). *Akuntansi Forensik & Audit Investigatif* (Vol. 2). Jakarta: Salemba Empat.
- [2] Republik Indonesia. (2019). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*.
- [3] Salahudin, A. (2018). *Pendidikan Antikorupsi*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- [4] Saleh, L. I., & Ratmono, D. (2017). Analisis Pengaruh Korupsi Terhadap Audit Pemerintah Pada Instansi Pemerintah Di Indonesia. *Diponegoro Journal Of Accounting, Volume 6, Nomor 1, ISSN: 2337-3806*, 1-13.
- [5] Khasanah, N. L., & Rahardjo, S. N. (2014). Pengaruh Karakteristik, Kompleksitas, Dan Temuan Audit Terhadap Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Diponegoro Journal Of Accounting, Volume 3, Nomor 3, ISSN: 2337-3806*, 1-11.
- [6] Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. (2019). *BPK RI Nomor 1 Tahun 2007 tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara*.
- [7] Rini, R., & Damiati, L. (2017). Analisis Hasil Audit Pemerintahan dan Tingkat Korupsi Pemerintahan Provinsi di Indonesia. *Jurnal Dinamika Akuntansi dan Bisnis Vol. 4(1), ISSN: 2355-9462*, 73-90.

- [8] Masdiantini, P. R., & Erawati, A. N. (2016). Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah, Kemakmuran, Intergovernmental Revenue, Temuan dan Opini Audit BPK Pada Kinerja Keuangan. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana.14. ISSN: 2302-8556, 1150-1182.*
- [9] Republik Indonesia. (2019). *Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.*
- [10] Khairudin, R. E. (2016). Pengaruh Transparansi Dan Akuntabilitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Terhadap Tingkat Korupsi Pemerintah Daerah (Studi Pada Pemerintah Kota Se-Sumatera). *JURNAL Akuntansi & Keuangan Volume 7, Nomor 2, September, ISSN: 2087-2054, 137-154.*
- [11] Mardiasmo. (2018). *Akuntansi Sektor Publik.* Yogyakarta: Andi.
- [12] Republik Indonesia. (2019). *Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan.*